



LAPORAN PENCAPAIAN IKK

LUAS AREAL PRESERVASI YANG DIKEMBANGKAN

TAHUN

2025

LAPORAN PENCAPAIAN IKK

LUAS AREAL PRESERVASI YANG DIKEMBANGKAN TAHUN 2025

Penyusun :
Tim Direktorat PEBAP

Pengarah :
Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.

Penerbit :
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 lantai 14
Jl. Gatot Subroto, Kecamatan Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Telp : 021-5746336
email : ditbppe.djksdae@gmail.com

Desember 2025



Gambar 1. Kuntul Kerbau (*Bubulcus ibis*). Dok Kegiatan BKSDA Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Laporan Pencapaian IKK : Luas Areal Preservasi Yang Dikembangkan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai pemenuhan kebutuhan informasi terhadap kegiatan yang dilakukan Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi pada tahun 2025.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah memberikan paradigma baru dalam konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Salah satu poin krusial adalah pengakuan terhadap Areal Preservasi sebagai bagian integral dari sistem penyangga kehidupan di luar kawasan konservasi konvensional. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen awal untuk memetakan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi pada areal-areal tersebut, guna memastikan keberlangsungan ekosistem di seluruh lanskap, baik di kawasan hutan maupun areal penggunaan lain.

Penyusunan laporan ini mencakup hasil identifikasi yang dilakukan oleh UPT, verifikasi, dan analisis spasial terhadap potensi Areal Preservasi. Kami menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sangat bergantung pada kolaborasi multipihak, mulai dari Pemerintah Daerah, sektor swasta, hingga masyarakat setempat.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data, verifikasi lapangan, hingga penyusunan profil potensi ini. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan valid bagi para pengambil kebijakan dalam mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam tata ruang dan rencana pembangunan berkelanjutan.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pengelolaan Areal Preservasi di masa mendatang.




Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.

DIREKTUR



Gambar 2. kus kus (*Phalanger orientalis*)
BBKSDA Papua Barat

DAFTAR ISI

II

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar, Daftar Isi

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Tujuan

5

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Target Kegiatan dan Alur Kerja

9

STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyusunan NSPK, Koordinasi/ Sosialisasi/ Bimbingan Teknis, Validasi Capaian

15

HASIL & PEMBAHASAN

Region Sumatera, Region Jawa Bali Nusra, Region Kalimantan, Region Sulawesi, Region Maluku Papua

34

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan dan Rekomendasi



Gambar 3. Dok Kegiatan Inventarisasi Area, Preservasi BKSDA Yogyakarta

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengurangan kehilangan keanekaragaman ekosistem dan spesies merupakan salah satu upaya untuk menghambat terjadinya triple planetary crisis yang saat ini mengancam kehidupan makhluk hidup secara global. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), triple planetary crisis merupakan tiga ancaman terhadap planet Bumi sebagai akibat dari tekanan-tekanan dari aktivitas manusia yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tekanan terhadap keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan, pencemaran, serta jenis spesies asing invasif.

Keanekaragaman hayati, khususnya satwa liar, tidak mengenal *boundaries*, batas kawasan hutan, ataupun batas administratif. Untuk itu, penguatan pengelolaan area dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar KSA, KPA, dan TB memerlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, khususnya pemangku kawasan. Posisi Kementerian Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal KSDAE sangat strategis karena Indonesia menganut paham *wildlife belongs to the state* atau tumbuhan dan satwa liar adalah milik Negara. Ditjen KSDAE beserta Unit Pelaksana Teknisnya merupakan wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan *welfare* dan *well-being* dari tumbuhan dan satwa liar.

Pemerintah Indonesia, melalui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2020 – 2024, telah menanggapi tantangan-tantangan tersebut dengan mengamanatkan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati pada area di sebelah barat garis *Wallacea* minimal seluas 43 juta hektar. Area-area ini penting untuk dipertahankan sebagai landasan dalam pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini juga selaras dengan beberapa komitmen Indonesia pada konvensi-konvensi lingkungan hidup global, diantaranya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Konvensi Ramsar, serta *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* (KMGBF).

Data dan informasi tersebut dimanfaatkan sebagai basis pengelolaan kehati, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Secara kumulatif, luasan area di luar KSA, KPA, dan TB yang telah diinventarisasi dan diverifikasi selama periode 2020-2024 adalah seluas 49.219.882,46 hektar. Berdasarkan data tersebut, sekitar 29 juta hektar atau lebih dari 50% diketahui masuk ke dalam kategori sebagai kawasan dengan skor kehati tinggi berdasarkan variabel tutupan hutan/lahan, ketersediaan air, dan temuan tumbuhan satwa liar. Pelaksanaan inventarisasi areal dengan nilai kehati tinggi di luar KSA, KPA, dan TB 2020-2024 telah menghasilkan berbagai data dan informasi penting. Sebagian besar area yang dikenali sebagai area dengan nilai kehati tinggi berada pada status kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi, yang penguasaannya berada pada Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Selain itu, pada lokasi-lokasi konsesi pihak swasta atau masyarakat juga ditemukan indikasi keberadaan satwa penting dan dilindungi, misalnya, di beberapa konsesi di Provinsi Kalimantan Barat terindikasi sebagai habitat atau ruang jelajah satwa Orangutan. Di sisi lain, hasil inventarisasi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar satwa liar berada atau terindikasi menjelajah pada area-area di sekitar kawasan konservasi atau sering disebut sebagai daerah penyangga kawasan konservasi.

Area-area penyangga ini sebagian besar berada pada penguasaan masyarakat umum. Seiring pesatnya pembangunan daerah, maka laju alih fungsi lahan dan tekanan lain terhadap keanekaragaman hayati pun semakin tidak dapat dielakkan. Untuk itu, data dan informasi hasil inventarisasi ini penting untuk diketahui dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, semakin memperkuat posisi sistem penyangga kehidupan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penguatan posisi sistem penyangga kehidupan tersebut bukan hanya memberikan amanah dalam pelestarian dan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, namun juga memasukkan Kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem penyangga kehidupan tidak hanya berbicara tentang sektor kehutanan namun melibatkan seluruh sektor yang ada di Indonesia.

Dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2029* juga memperkuat posisi Areal Preservasi sebagai area perlindungan kehati. Areal Preservasi menjadi salah satu area yang menjadi target pada dokumen IBSAP, khususnya Target Nasional 1 Terintegrasinya Perlindungan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi dan Ekosistem dalam Tata Ruang Darat dan Laut yang Terpadu pada Kelompok Aksi 1.1 dan Kelompok Aksi 1.3. Selain itu, Areal Preservasi masuk pada Target Nasional 3 Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan yang Efektif di Kawasan Lindung dan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Ekosistem Darat dan Perairan, pada Kelompok Aksi 3.3, 3.4, dan 3.6. Pengelolaan kehati juga telah tercantum dalam dokumen aksi penurunan emisi gas rumah kaca, *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan pengembangan *Areal Preservasi* seluas 4 juta hektar (Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang dikembangkan Tahun 2025 - 2029 sebagaimana terlampir pada tabel 1). Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 - 2029 sebesar 4 juta hektar diperlukan mekanisme kerja yang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama, Persiapan Pelaksanaan dengan keluaran berupa Surat Keputusan Tim Kerja sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap kedua, Verifikasi Lapangan, tahapan ini menghasilkan notulensi yang berisi Laporan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan. Tahap ketiga, Penyusunan Laporan, tahapan ini berfokus pada penyusunan Peta dan profil Potensi Areal Preservasi, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil sebagai keluaran akhir.

Sebagai bagian dari upaya mencapai target tersebut, penyusunan peta potensi Areal Preservasi menjadi langkah awal yang krusial dalam memastikan arah pengembangan Areal Preservasi. Identifikasi awal areal dilakukan secara dengan mengacu pada kriteria, antara lain areal yang berada di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta memiliki potensi konservasi keanekaragaman hayati yang tinggi. Melalui pendekatan ini, proses identifikasi Areal Preservasi pada kawasan prioritas dapat dilakukan dengan objektif, sehingga menghasilkan **Usulan Arahan Areal Preservasi** yang dapat dianalisis lebih lanjut.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen laporan potensi pengembangan areal preservasi dimaksudkan untuk memperoleh dan menghimpun data serta informasi terkait kondisi biofisik, sosial, dan tata kelola wilayah dari potensi areal preservasi yang terverifikasi.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menunjukkan area-area yang memiliki potensi sebagai areal preservasi, yang telah terpetakan secara spasial dan memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai potensi pengembangan areal preservasi.



Gambar 4. Dok Kegiatan inventarisasi Area, Preservasi BKSDA Yogyakarta

BAB II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Target Kegiatan

Sebagai bagian dari implementasi amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029, sektor kehutanan memikul tanggung jawab terhadap 22 indikator kinerja nasional. Melalui indikator inilah kontribusi kehutanan terhadap keberlanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dinilai secara transparan dan terukur. Arah kebijakan periode 2025–2029 menegaskan peran kehutanan sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan, pengungkit ekonomi hijau, dan instrumen strategis dalam menjaga fungsi ekologis Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi memegang peran kunci melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 - 2029 sebesar 4.028.000 hektar (Tabel 1). Direktorat PEBAP memastikan bahwa komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan ekosistem berjalan secara terukur, adaptif, dan berbasis sains.

Tabel 1. Target IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Luasan (Ha)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Luas areal preservasi yang dikembangkan	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Pada RPJMN Kementerian Kehutanan 2025-2029, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun awal dengan target pelaksanaan kegiatan Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan seluas 528.000 hektar pada 26 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BBKSDA/BKSDA). Namun, pada bulan Maret 2025 dilakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian target kinerja menjadi 301.304,70 hektar pada 20 UPT BBKSDA/BKSDA, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Target UPT dan Penyesuaian Target Dampak Efisiensi (dalam hektar)

No	UPT Penanggung Jawab	Target	Target Setelah Efisiensi
1	BKSDA DKI JAKARTA	75,46	75,46
2	BBKSDA JAWA BARAT	200,02	0,00
3	BKSDA JAWA TENGAH	7.340,05	2.500,00
4	BBKSDA JAWA TIMUR	1.551,60	0,00
5	BKSDA ACEH	1.586,09	1.586,09
6	BBKSDA SUMATERA UTARA	36.644,19	36.644,19
7	BKSDA SUMATERA BARAT	28.949,55	15.808,63
8	BBKSDA RIAU	5.135,97	5.135,97
9	BKSDA JAMBI	40.153,21	0,00
10	BKSDA SUMATERA SELATAN	26.121,39	26.121,39

No	UPT Penanggung Jawab	Target	Target Setelah Efisiensi
11	BKSDA KALIMANTAN BARAT	17.955,00	11.544,00
12	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	34.293,57	10.000,00
13	BKSDA SULAWESI UTARA	3.321,24	1.200,00
14	BKSDA SULAWESI TENGAH	47,39	25,00
15	BBKSDA SULAWESI SELATAN	59.871,30	59.871,30
16	BKSDA SULAWESI TENGGARA	25.616,35	1.500,00
17	BKSDA MALUKU	380,30	380,30
18	BKSDA BALI	65,59	65,59
19	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	26.370,39	0,00
20	BKSDA BENGKULU	35.671,09	300,00
21	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	511,18	0,00
22	BBKSDA PAPUA	38.229,60	400,00
23	BBKSDA PAPUA BARAT	299,98	100,00
24	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	127.956,78	127.956,78
25	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	9.504,70	0,00
26	BKSDA D.I. YOGYAKARTA	146,55	90,00
	Jumlah	527.998,54	301.304,70

Target kegiatan RBC FOLU Norway Contribution 2 & 3

Kebijakan areal preservasi berperan dalam menaungi upaya perlindungan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi, sekaligus meningkatkan cadangan karbon, khususnya pada kawasan penyangga hutan konservasi dan ABKT di sekitarnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Sejalan dengan dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030, terdapat ketentuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan dengan mempertimbangkan kualitas hutan berdasarkan besarnya cadangan karbon dan tingkat penutupan tajuk. Areal Preservasi masuk pada Target Nasional 3 yaitu Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan yang Efektif di Kawasan Lindung dan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Ekosistem Darat dan Perairan, pada Kelompok Aksi 3.3, 3.4, dan 3.6. Pengelolaan kehati juga telah tercantum dalam dokumen aksi penurunan emisi gas rumah kaca, Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

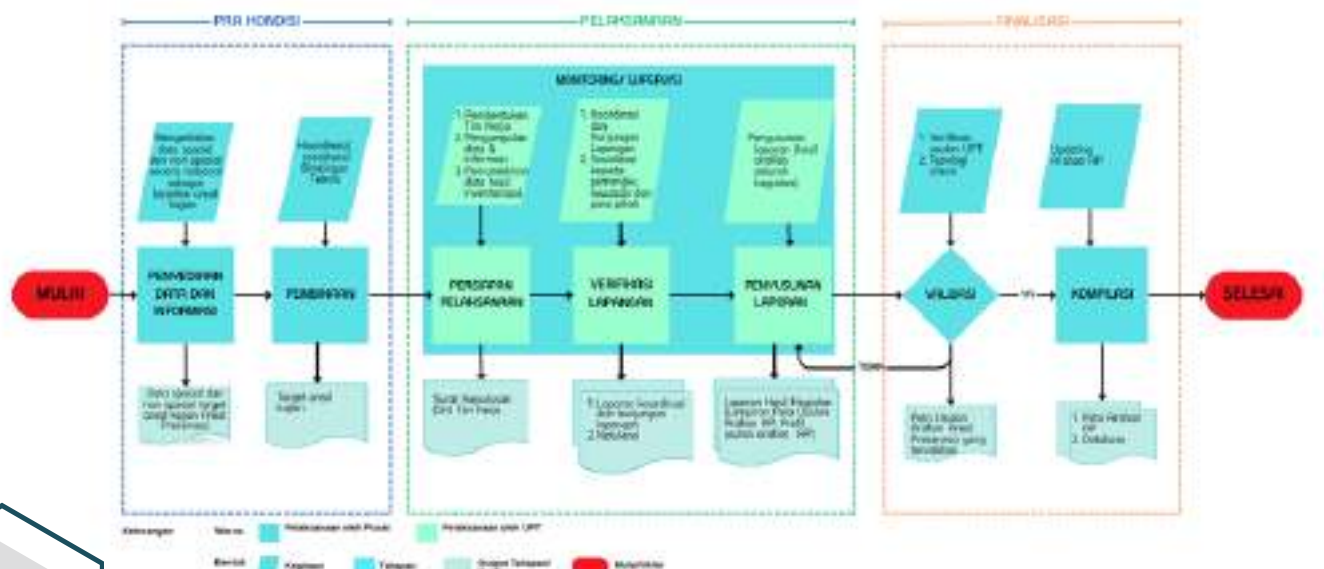
Direktorat Jenderal KSDAE menjadi salah satu Implementing Partner Proyek RBC FOLU Norway Contribution 2&3 untuk periode pelaksanaan Tahun 2025-2027. Direktorat PEBAP mendapatkan target Identifikasi Potensi Daerah Penyangga Taman Nasional dan ABKT sebagai Areal Preservasi seluas 510.386,13 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional memperkuat dan mendukung proses identifikasi potensi areal preservasi, sekaligus mendorong pencapaian target pengembangan areal preservasi secara berkelanjutan. Secara rinci alokasi target RBC FOLU NC 2&3 pada masing-masing UPT selama Tahun 2025-2027 disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Target UPT dan Penyesuaian Target Dampak Efisiensi (dalam hektar)

No	UPT Penanggung Jawab	Target (Ha)
1	BKSDA NUSA TENGGARA BARAT	38.102,86
2	BBTN BROMO TENGGER SEMERU	5.922,19
3	BBTN BUKIT BARISAN SELATAN	21.957,47
4	BBTN GUNUNG GEDE PANGRANGO	32.375,15
5	BBTN GUNUNG LEUSER	138.190,66
6	BBKSDA JAWA TIMUR	2.251,11
7	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	2.900,53
8	BKSDA JAMBI	46.647,20
9	BTN BANTIMURUNG BULUSARAUNG	27.229,14
10	BTN GUNUNG CIREMAI	1.760,72
11	BTN GUNUNG HALIMUN SALAK	1.046,09
12	BTN GUNUNG RINJANI	6.406,82
13	BTN SEBANGAU	59.481,82
14	BTN TAKABONERATE	2.398,16
15	BTN WAY KAMBAS	8.162,03
16	BBKSDA JAWA BARAT	744,15
17	BKSDA KALIMANTAN TIMUR	32.313,29
18	BTN GUNUNG PALUNG	21.839,18
19	BKSDA KALIMANTAN BARAT	17.956,98
20	BTN TANJUNG PUTING	42.200,59
21	BBKSDA SUMATERA UTARA	500,00
	JUMLAH	510.386,13

B. Alur Kerja

Alur Kerja untuk pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :



Gambar 5. Alur kerja pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yg Dikembangkan

Alur Kerja untuk pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pra Kondisi

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP), berperan dalam tahapan Pra Kondisi, meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi dan pembinaan (Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis).

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pengembangan Areal Preservasi disusun secara sistematis yang dirancang mulai dari persiapan, verifikasi lapangan, hingga penyusunan laporan. Rangkaian kegiatan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, implementasi, serta evaluasi pengembangan Areal Preservasi. Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan, diantaranya :

a. Persiapan pelaksanaan

- Pembentukan tim kerja
- Pengumpulan Data dan Informasi
- Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi

b. Verifikasi lapangan

- Koordinasi dan Kunjungan Lapangan
- Sosialisasi kepada Pemangku Areal/Kawasan dan Para Pihak

c. Penyusunan laporan

- Peta usulan arahan Areal Preservasi
- Profil usulan arahan Areal Preservasi

3. Finalisasi

Tahapan finalisasi dilaksanakan pada tingkat pusat (Direktorat PEBAP) untuk melakukan validasi dan kompilasi terhadap usulan peta potensi Areal Preservasi dan matriks profilnya. Verifier yang digunakan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4. Verifier Pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan

No	Tahapan/ Proses	Kegiatan	Output Tahapan (Verifier)
1	Persiapan Pelaksanaan	1. Pembentukan Tim Kerja 2. Pengumpulan Data dan Informasi 3. Pemutakhiran Data Hasil Inventarisasi	Surat Keputusan (SK) Tim Kerja
2	Verifikasi Lapangan	1. Koordinasi dan Kunjungan Lapangan 2. Sosialisasi kepada Pemangku Areal/Kawasan dan Para Pihak	1. Laporan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan 2. Notulensi
3	Penyusunan Laporan	Menyusun laporan usulan arahan areal preservasi	Laporan Hasil terdiri dari peta usulan arahan Areal Preservasi dan matriks profil

BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penyusunan NSPK

Kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Areal Preservasi dilaksanakan sebagai upaya penguatan landasan kebijakan sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi.

Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (Direktorat PEBAP) mendapatkan tanggung jawab untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu RPP Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK) dan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah Areal Preservasi, termasuk dalam penyusunan muatan substansi yang terdiri dari Pendanaan mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pelibatan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam Konsentrasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sampai saat ini, Direktorat PEBAP telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen Naskah Akademik sebagai kajian awal yang komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (UU 32/2024). Hal yang sangat penting untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan PP WSPK dan Areal Preservasi adalah penggalan materi, masukan, dan rumusan pemikiran terkait isu-isu kritis, landasan filosofis, konsep, dan kriteria-kriteria WSPK dan Areal Preservasi. Dalam pembahasannya melibatkan Eselon I dan II lingkup KemenHut, K/L terkait, LSM, Praktisi, Akademisi, dan Masyarakat.



Gambar 6. Pelibatan banyak pihak pada kegiatan Penyusunan NSPK serta Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi

Dalam tahapan penyusunan RPP WPSPK dan Areal Preservasi, Sampai dengan akhir tahun 2025, Direktorat PEBAP telah melaksanakan sebanyak 4 (empat) kali Focus Group Discussion (FGD) dengan tema sebagai berikut :

- FGD I. Isu kritis, filosofis, konsepsi dan kriteria WPSP Kriteria, Mekanisme dan Verifikasi dan Areal Preservasi (pada Bulan Juni)
- FGD II. Kriteria, mekanisme dan verifikasi WPSPK dan Areal Preservasi (pada Bulan Juli)
- FGD III Series 1. Tata kelola Areal Preservasi berdasarkan perspektif teori dan kebijakan (pada Bulan Agustus)
- FGD III Series 2. Pembelajaran tingkat tapak untuk pengembangan tata kelola Areal Preservasi (pada Bulan November)

Pelaksanaan kegiatan FGD ditujukan untuk mengidentifikasi isu-isu kritis yang terkait dengan WPSPK, khususnya Areal Preservasi serta mendiskusikan dan menyelaraskan rumusan konsep yang akan diimplementasikan pada RPP.

Penyusunan NSPK juga dilaksanakan untuk menyusun pedoman dalam pencapaian IKK “Luas Areal Preservasi yang dikembangkan” yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Pencapaian IKK tahun 2025-2029. Pedoman ini sebagai acuan dan tahapan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Areal Preservasi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pedoman ini disusun melalui beberapa tahapan diskusi dan pembahasan yang telah melibatkan internal Direktorat PEBAP, Eselon II lingkup Ditjen KSDAE, UPT Lingkup KSDAE (Balai KSDA dan Balai Taman Nasional), LSM serta Praktisi.



Gambar 7. Penyusunan NSPK serta Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan dan Areal Preservasi yang dilaksanakan dalam 4 series dengan beragam tema

B. Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk memberikan pembekalan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan sekaligus menjadi media sosialisasi mengenai nomenklatur Areal Preservasi yang tercantum pada UU 32 tahun 2024 dan untuk mendorong pemahaman bersama terhadap peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja pengembangan areal preservasi yang menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati tinggi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) bagian dengan mempertimbangkan karakteristik dan tipologi terhadap kekhasan wilayah masing masing. Bimbingan Teknis pertama dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan (27-29 Agustus 2025) untuk UPT yang berada di Wilayah Indonesia bagian Timur, sementara kegiatan bimbingan teknis yang kedua dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau (17-18 September 2025) untuk UPT yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Peserta bimbingan teknis terdiri dari seluruh staf teknis Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional di seluruh Indonesia yang menangani/bertanggung jawab/ validata kegiatan yang membidangi Areal Preservasi pada masing masing UPT dan perwakilan Direktorat Teknis Ditjen KSDAE.



Gambar 8. Kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi dalam pencapaian IKK Luas areal preservasi yang dikembangkan dengan mengundang UPT Balai Besar/ Balai KSDA dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional sebagai peserta kegiatan

C. Validasi Capaian IKK Areal Preservasi

Validasi capaian luas areal preservasi yang dikembangkan diterjemahkan dalam kegiatan verifikasi data data capaian hasil pelaksanaan dari UPT KSDAE (Balai KSDA dan Balai Taman Nasional). Kegiatan ini dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 4-5 Desember 2025.

Tujuannya untuk memastikan keberadaan dan status pengelolaan wilayah-wilayah dengan fungsi ekologis penting wilayah-wilayah Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar hutan konservasi, termasuk daerah penyangga Taman Nasional yang berpotensi sebagai Areal Preservasi, guna mendukung perlindungan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem secara berkelanjutan. Peserta bimbingan teknis adalah seluruh staf teknis Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi berbasis Sistem Informasi Geografis sekaligus menangani/ bertanggung jawab/ walidata kegiatan yang membidangi Areal Preservasi pada masing masing UPT dan perwakilan Direktorat Teknis Ditjen KSDAE.

Peserta akan diminta untuk menyerahkan data spasial potensi areal preservasi di wilayah masing masing beserta profilnya untuk kemudian diverifikasi oleh tim teknis dari Direktorat PEBAP. Hasil verifikasi ini nantinya akan dicatatkan sebagai baseline potensi areal preservasi. Berdasarkan Pedoman Pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan, alur Kerja untuk pencapaian IKK, dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Pra Kondisi : Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi (PEBAP), berperan dalam tahapan Pra Kondisi, meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi dan pembinaan (Koordinasi/Sosialisasi/Bimbingan Teknis).
2. Pelaksanaan : Tahapan pelaksanaan pengembangan Areal Preservasi disusun secara sistematis yang dirancang mulai dari persiapan, verifikasi lapangan, hingga penyusunan laporan. Rangkaian kegiatan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, implementasi, serta evaluasi pengembangan Potensi Areal Preservasi.
3. Finalisasi : Tahapan finalisasi dilaksanakan pada tingkat pusat (Direktorat PEBAP) untuk melakukan validasi dan kompilasi terhadap usulan peta potensi Areal Preservasi dan matriks profilnya.



Gambar 9. Kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi dalam pencapaian IKK Luas areal preservasi yang dikembangkan

D. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada pengembangan areal preservasi bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan areal preservasi di tingkat tapak, mengidentifikasi tantangan dan peluang serta masukan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan areal preservasi.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan penyusunan pengembangan Areal Preservasi dan berperan sebagai peningkatan kualitas pelaporan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan kinerja berbasis hasil, serta pemenuhan prinsip transparansi. Disisi lain, menjadi dasar dalam penyampaian laporan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, perbaikan strategi pelaksanaan, serta penguatan kebijakan pembinaan pengelolaan Areal Preservasi. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta penyusunan laporan capaian IKK Pengembangan Areal Preservasi secara terukur dan berkelanjutan.



Gambar 10. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Areal Preservasi



Gambar 11. Kuskus Waigeo (*Spilocus papuensis*)-BBKSDA Papua Barat

BAB IV. HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan untuk IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Dari target luasan sebesar 528.000 ha, masih terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak menyampaikan hasil potensi pengembangan areal preservasi, baik karena tidak dibebani target capaian maupun karena tidak melaksanakan kegiatan sebagai dampak pengurangan dan/atau pengalihan anggaran.

Sampai dengan 31 Desember 2025, areal preservasi yang telah tervalidasi di seluruh Indonesia mencapai seluas 434.421,34 Ha atau 141,06% dari total luas target. Hasil capaian dari 28 UPT Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional. Nilai Capaian ini melebihi target yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2025-2029. Dalam pelaksanaan lapangan, Balai Besar/Balai juga melibatkan hampir semua pemangku kepentingan dan para pihak yang terkait pada masing-masing wilayah kerja. Para pihak yang dilibatkan diantaranya Pemerintah Daerah, akademisi/Universitas, LSM/NGO, praktisi, dunia usaha, serta masyarakat sekitar. Rincian target dan capaian pada masing-masing UPT Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian IKK Luas Areal preservasi yang dikembangkan

No	UPT Penanggung Jawab	Target (Ha)	Capaian (Ha)
1	BKSDA DKI JAKARTA	75,46	150,55
2	BKSDA JAWA TENGAH	2.500,00	7.725,69
3	BKSDA ACEH	1.586,09	4.141,09
4	BBKSDA SUMATERA UTARA	36.644,19	31.830,62
5	BKSDA SUMATERA BARAT	15.808,63	19.302,55
6	BBKSDA RIAU	5.135,97	8.500,26
7	BKSDA SUMATERA SELATAN	26.121,39	40.736,55
8	BKSDA KALIMANTAN BARAT	11.544,00	15.230,03
9	BKSDA KALIMANTAN SELATAN	10.000,00	17.656,86
10	BKSDA SULAWESI UTARA	1.200,00	10.423,06
11	BKSDA SULAWESI TENGAH	25,00	261,958
12	BBKSDA SULAWESI SELATAN	59.871,30	69.593,24
13	BKSDA SULAWESI TENGGARA	1.500,00	0,00
14	BKSDA MALUKU	380,30	1.466,78
15	BKSDA BALI	65,59	65,59
16	BKSDA BENGKULU	300,00	10.037,65
17	BBKSDA NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	54.688,03
18	BBKSDA PAPUA	400,00	1.518,39
19	BBKSDA PAPUA BARAT DAYA	100,00	472,52
20	BKSDA KALIMANTAN TENGAH	127.956,78	127.166,27
21	BKSDA D.I. YOGYAKARTA	90,00	3.388,42
22	BTN GUNUNG CIREMAI	1.760,72	1.756,56
23	BTN GUNUNG RINJANI	6.406,82	8.308,68
	JUMLAH	307.972,24	434.421,34

Salah satu faktor yang mendukung pencapaian IKK Luas Areal Preservasi yang Dikembangkan Tahun 2025 adalah optimalisasi dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Pendanaan berasal dari DIPA APBN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada 19 UPT, dukungan pendanaan Proyek FOLU *Norway Contribution 2&3* pada *Implementing Partner* Ditjen KSDAE yang dimanfaatkan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, serta pendanaan mitra kerja melalui Proyek *Investing In The Komodo Dragon and Other Globally Threatened Species In Flores (INFLORES)* yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.

Dukungan pendanaan dari berbagai sumber tersebut berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan pengembangan Areal Preservasi berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya dalam kerangka Indonesia's FOLU Net Sink 2030, melalui pendekatan konservasi terpadu yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan cadangan karbon, tetapi juga perlindungan nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem penting, sehingga upaya perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi, termasuk kawasan penyangga hutan konservasi dan ABKT, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekologis yang optimal.



Gambar 12. Bentang alam yang dapat terlihat pada kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan

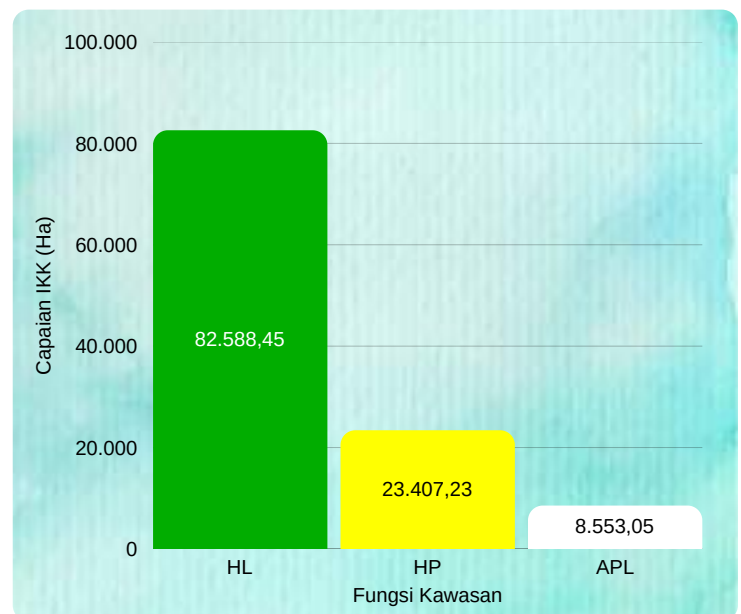
A. REGION SUMATERA



Gambar 13. Peta sebaran capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Sumatera

Pulau Sumatera merupakan sebuah koridor ekologis vital yang menjadi benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati megafauna Asia di Indonesia. Berdasarkan data survei Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) lingkup Region Sumatera, akan mengevaluasi interaksi strategis antara pola tata ruang yang secara signifikan didominasi oleh fungsi Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan habitat esensial bagi spesies payung (umbrella species) berstatus Kritis (Endangered; EN) seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan Tapanuli.

Potensi Areal Preservasi di Region Sumatera Tahun 2025 seluas 114.548,72 hektar, yang tersebar di Provinsi Aceh, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Fungsi kawasan yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 82.588,45 hektar, Hutan Produksi (HP) seluas 23.407,23 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 8.553,05 hektar. Potensi Areal Preservasi di Region Sumatera pada masing-masing provinsi dijabarkan sebagaimana tabel berikut :



Gambar 14. Grafik capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Sumatera berdasarkan fungsi kawasan

Tabel 6. Profil singkat capaian Areal Preservasi yang dikembangkan di Region Sumatera

No	Provinsi	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan	Nilai Penting
1	Aceh	1	4.141,09	HP: 3.167,97 Ha APL: 967,86 Ha	Habitat Gajah dan Harimau Sumatera
2	Sumatera Utara	1	31.830,62	HL: 17.661,89 Ha HP: 6.594,09 Ha APL: 7.548,74 Ha	Habitat Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatera; Kearifan lokal Hatabosi
3	Sumatera Barat	1	19.302,55	HL: 14.157,64 Ha HP: 5.144,90 Ha	Habitat Harimau Sumatera dan Siamang; Hutan Nagari dan Hutan Adat
4	Riau	2	8.500,26	HP: 8.500,26 Ha	Ekosistem Gambut; Kantong Habitat Harimau Sumatera
5	Lampung	1	10.037,65	HL: 10.037,65 Ha	Habitat Harimau Sumatera; Catchment Area DAS Way Sekampung
6	Sumatera Selatan	1	40.736,55	HL: 40.731,27Ha APL: 5,29 Ha	Kantong Habitat Harimau Sumatera dan Tapir
			114.458,72		

Sebaran unit potensi Areal Preservasi di Region Sumatera menunjukkan luas lahan yang besar di Provinsi Sumatera Selatan seluas 40.736,55 hektar dan Sumatera Utara seluas 31.830,62 hektar, meskipun secara kuantitas jumlah unit terbanyak berada di Provinsi Riau dengan 2 unit preservasi. Pola ini menunjukkan bahwa potensi Areal Preservasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi sangat bergantung pada fungsi kawasan yang didominasi oleh hutan lindung dan hutan produksi, serta area areal penggunaan lain yang masih memiliki nilai konservasi tinggi. Kondisi tersebut mencerminkan lanskap yang memegang peran krusial sebagai habitat spesies payung dan penyedia jasa ekosistem seperti catchment area dan perlindungan gambut. Mengingat keragaman fungsi lahan dan adanya nilai penting berupa kearifan lokal (seperti Hatabosi dan Hutan Nagari), diperlukan pendekatan pengelolaan yang adaptif dan berbasis konektivitas. Hal ini penting untuk memitigasi efek fragmentasi habitat, sehingga fungsi ekologis dan keberlanjutan koridor kehidupan di sepanjang wilayah Region Sumatera tetap terjaga secara terintegrasi. Temuan ini juga menggarisbawahi urgensi pengelolaan lanskap terpadu untuk memitigasi fragmentasi habitat, mengingat tingginya variabilitas ekosistem di wilayah ini, mulai dari lahan gambut basah di Riau hingga koridor pegunungan di Lampung dan Sumatera Utara



Gambar 15. Gambaran wilayah kegiatan kunjungan lapangan pada region Sumatera

Nilai penting keanekaragaman hayati di Region Sumatera tercermin dari tingginya kompleksitas spesies yang menghuni unit-unit preservasi tersebut. harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) muncul sebagai spesies payung utama yang teridentifikasi di hampir seluruh kantong habitat, sering kali ditemukan berbagi ruang dengan mamalia besar lainnya seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), tapir asia (*Tapirus indicus*), dan beruang madu (*Helarctos malayanus*). Keberadaan predator puncak dan herbivora besar ini menunjukkan bahwa fungsi ekosistem di wilayah tersebut masih mampu mendukung rantai makanan yang kompleks.

Selain megafauna, wilayah ini menjadi habitat krusial bagi berbagai jenis primata endemik dan terancam punah, termasuk orangutan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), siamang (*Symphalangus syndactylus*), ungko sumatera (*Hylobates agilis agilis*), serta surili sumatera (*Presbytis melalophos*). Diversitas fauna ini juga mencakup jenis kucing hutan seperti Kucing tandang (*Felis chaus*), kucing emas (*Catopuma temminckii*) dan kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), hingga satwa unik seperti trenggiling (*Manis javanica*), anjing hutan (*Cuon alpinus*), dan landak (*Hystrix sp.*).



Gambar 16. Perjumpaan satwa menggunakan *camera trap*, Dok BKSDA Bengkulu

Analisis tutupan lahan (*land cover*) Region Sumatera mengungkap pola distribusi vegetasi yang sangat dipengaruhi oleh zonasi fungsi kawasan. Hutan Lahan Kering Sekunder mendominasi struktur vegetasi wilayah ini dengan luasan mencapai 50.391,89 hektar, di mana mayoritas (67%) berada dalam kawasan hutan lindung, mengindikasikan efektivitas fungsi lindung dalam menjaga regenerasi hutan pasca-gangguan. Sementara itu, Hutan Primer yang menjadi benteng terakhir biodiversitas asli terkonsentrasi secara signifikan seluas 31.479,34 hektar di dalam kawasan hutan lindung, menegaskan peran vital area ini sebagai zona inti ekologis. Selain itu, tutupan lahan juga didominasi oleh pertanian lahan kering campung dan semak belukar. Kehadiran tipe tutupan ini mencerminkan dinamika pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang berbatasan langsung dengan habitat satwa, sehingga memerlukan strategi mitigasi konflik dan pemulihan ekosistem yang intensif. Sebaran semak belukar di beberapa titik strategis justru berpotensi menjadi zona penyangga (*buffer zone*) yang krusial jika dikelola melalui pendekatan restorasi berbasis masyarakat guna memperkuat integritas kawasan preservasi secara keseluruhan.

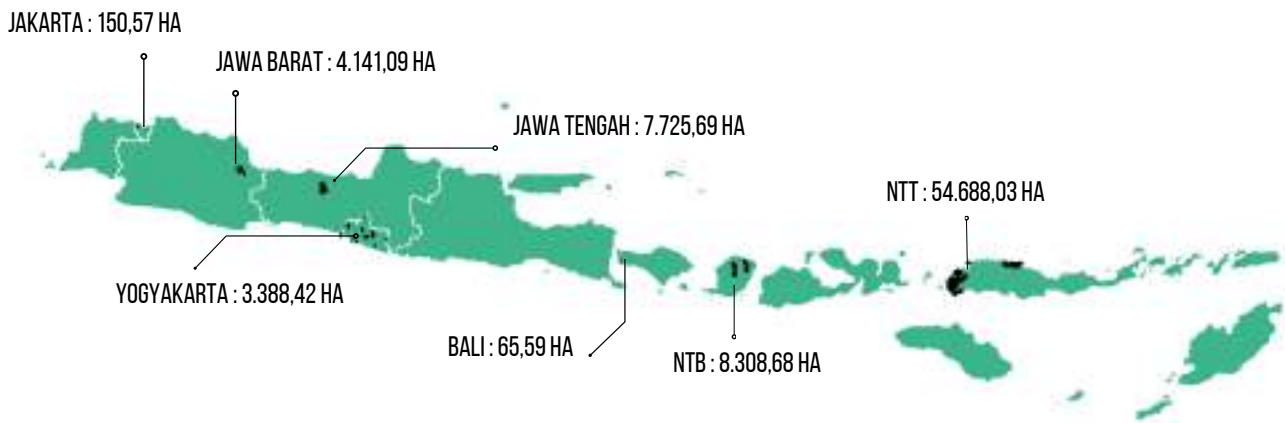
Secara spasial, distribusi tutupan lahan tersebut terintegrasi ke dalam Ekoregion Kompleks yang membentang dari utara hingga selatan pulau. Wilayah ini mencakup bentang alam pegunungan yang sangat krusial, seperti Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Janthoi – Gunung Leuser dan Kerinci Seblat – Bukit Barisan Selatan. Karakteristik geomorfologi yang bervariasi, mulai dari Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Pantai Timur Sumatera hingga wilayah vulkanik seperti Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Maninjau Utara Selatan – Gunung Sado dan Gumay Tebing Tinggi – Gunung Raya, menciptakan relung ekologis yang unik bagi beragam spesies endemik.

Selain itu, keberadaan Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Siranggass – Batang Gadis serta Bukit Rimbang – Bukit Baling Dangku – Bukit Tiga Puluh menegaskan bahwa unit areal preservasi ini berada pada koridor perbukitan yang rawan terhadap perubahan bentang alam. Sinkronisasi antara pengelolaan tutupan hutan dengan karakteristik ekoregion, termasuk wilayah perbukitan vulkanik seperti Sibolangit – Dolok – Sipirok, menjadi parameter utama dalam menentukan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlangsungan hidup harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan satwa kunci lainnya yang bergantung pada integritas ekoregion tersebut.



Gambar 17. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi bidang Areal Preservasi yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai KSDA dan Taman Nasional pada region Sumatera

B. REGION JAWA BALI NUSA TENGGARA



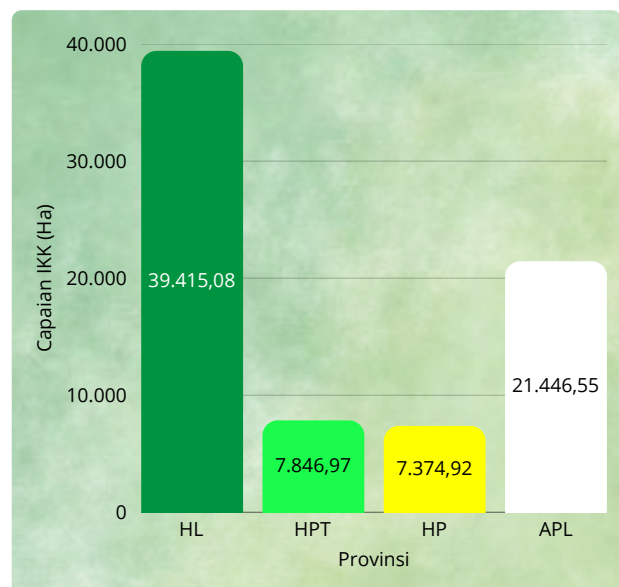
Gambar 18. Peta sebaran capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Jawa Bali Nusa Tenggara

Region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis yang tinggi dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Region ini mencerminkan kompleksitas dan kontras ekologi yang tinggi, mencakup sistem pegunungan vulkanik di Pulau Jawa, ekosistem pesisir dan mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting di Bali, dan bentang alam semi arid dan savanna yang menjadi habitat spesies purba di Kepulauan Nusa Tenggara.

Potensi Areal Preservasi di Region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2025 seluas 76.083,52 hektar, yang tersebar di Provinsi Bali, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Fungsi kawasannya yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 39.415,08 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 7.846,97 hektar, Hutan Produksi (HP) seluas 7.374,92 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 21.446,55 hektar. Potensi Areal Preservasi di Region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada masing-masing provinsi dijabarkan sebagaimana tabel berikut :



Gambar 19. Gambaran wilayah Kunjungan lapang (Dok Balai TN Gunung Ceremai)



Gambar 20. Grafik capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Jawa Bali Nusa Tenggara berdasarkan fungsi kawasan

Tabel 7. Potensi Areal Preservasi Region Jawa Bali Nusa Tenggara

No	Provinsi	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan	Nilai Penting
1	Bali	1	65,59	APL: 65,59 Ha	Ekosistem mangrove, habitat burung migran, dan lokasi bertelur Penyu Lekang
2	Jakarta	3	150,57	APL: 86,40 Ha HL: 34,33 Ha HP: 29,82 Ha	Jalur migrasi dan feeding ground burung migran, habitat burung air, buaya muara, dan monyet ekor panjang, serta sumber mata pencaharian masyarakat
3	Jawa Tengah	1	7.725,69	HL: 17,20 Ha HPT: 7.708,49 Ha	Habitat spesies satwa dilindungi dan terdapat tradisi masyarakat Nyadran Gebyog untuk melestarikan alam
4	Jawa Barat	12	1.756,56	APL: 1.604,96 Ha HL: 13,12 Ha HPT: 138,48 Ha	Habitat spesies satwa dilindungi, zona penyangga kawasan konservasi, penyangga sistem mata air, area mitigasi bencana, dan tradisi sosial-budaya masyarakat Sunda.
5	Yogyakarta	13	3.388,42	APL: 3.248,51 Ha HP: 139,90 Ha	Ekosistem mangrove, karst, jalur migrasi burung, habitat satwa dilindungi, sumber mata air alami, tradisi sosial budaya masyarakat, dan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim
6	Nusa Tenggara Timur	13	54.688,03	APL: 16.437,55 Ha HL: 31.046,15 Ha HP: 7.205,19	Habitat komodo, kakatua jambul kuning, rusa timor, dan burung gosong kaki merah serta ekosistem karst
7	Nusa Tenggara Barat	11	8.308,68	APL: 8.75 Ha HL: 6.398,07 Ha	Kawasan penyangga kawasan konservasi, habitat satwa dilindungi, memiliki tradisi sosial budaya masyarakat, sumber air
	Total	54	74.182,53		

Unit Areal Preservasi menggambarkan sebaran jumlah wilayah potensial, dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing sebanyak 13 unit, serta di Provinsi Jawa Barat sebanyak 12 unit. Pola ini menunjukkan bahwa potensi Areal Preservasi di setiap wilayah memiliki sebaran dan karakteristik spasial yang berbeda. Kondisi tersebut mencerminkan lanskap yang telah mengalami fragmentasi, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis konektivitas ekosistem untuk menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan kawasan.



Gambar 21. Salah satu perjumpaan Burung Madu Jawa (*Aethopyga mystacalis*) - (Dok BKSDA Yogyakarta)

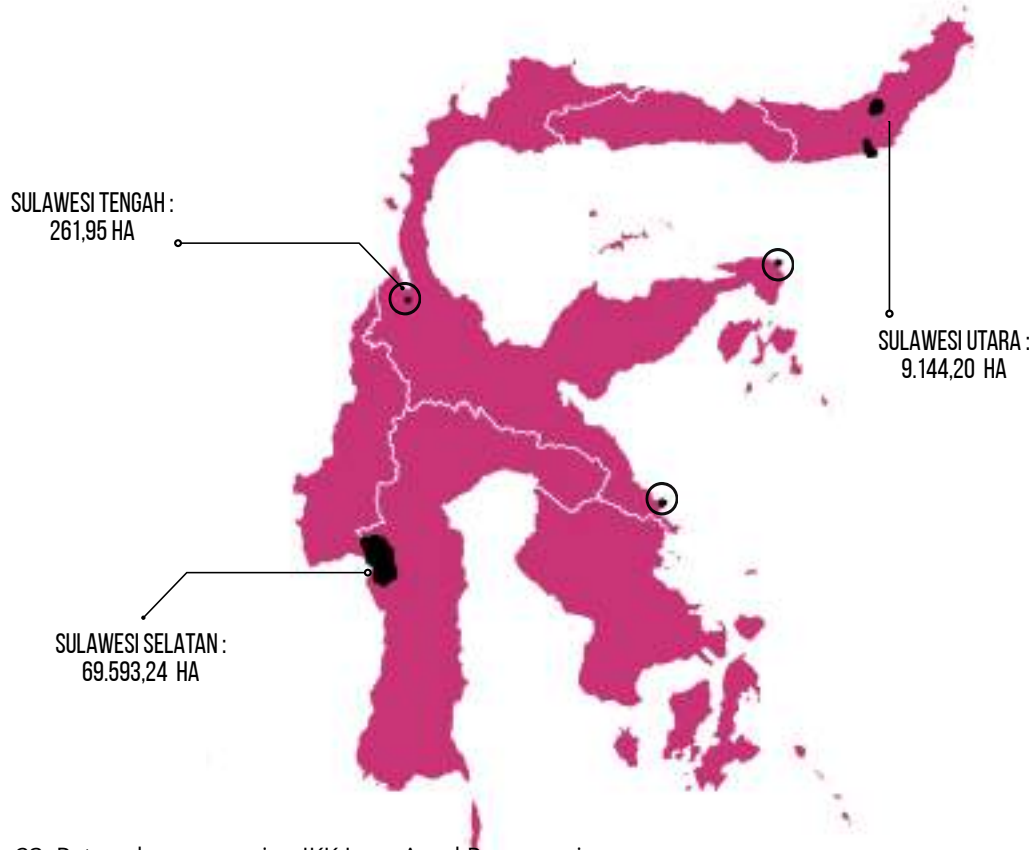
Nilai penting potensi Areal Preservasi di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terletak pada fungsi perlindungan habitat satwa, daerah tangkapan air, lereng perbukitan, serta ekosistem karst. Perlindungan terhadap fungsi-fungsi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan wilayah, ketersediaan sumber daya air, serta pengurangan risiko bencana, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan pembangunan yang besar. Wilayah ini juga berperan penting sebagai habitat bagi satwa endemik dan dilindungi, seperti macan tutul (*Panthera pardus*), elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), dan owa jawa (*Hylobates moloch*) di Pulau Jawa. Sementara itu, keberadaan satwa seperti komodo (*Varanus komodoensis*), kakatua kecil jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) dan burung gosong kaki merah (*Megapodius reinwardt*) menjadi penciri utama keanekaragaman hayati di Bali dan Nusa Tenggara, yang memperkuat nilai strategis kawasan tersebut sebagai potensi Areal Preservasi.

Sejalan dengan karakteristik biofisik dan fungsi ekologis, tutupan lahan potensi Areal Preservasi di region Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara didominasi oleh hutan lahan kering sekunder, yang mencakup sekitar 50% dari total luasan potensi areal preservasi. Selain itu, tutupan lahan lainnya berupa semak belukar, hutan lahan kering sekunder, serta savanna, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, yang mencerminkan kondisi ekologis khas kawasan tersebut. Variasi tutupan lahan ini menunjukkan besarnya peran Areal Preservasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung habitat satwa, serta memperkuat fungsi perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.



Gambar 22. Kegiatan sosialisasi dan koordinasi bidang Areal Preservasi yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai KSDA dan Taman Nasional pada region Jawa Bali Nusa Tenggara

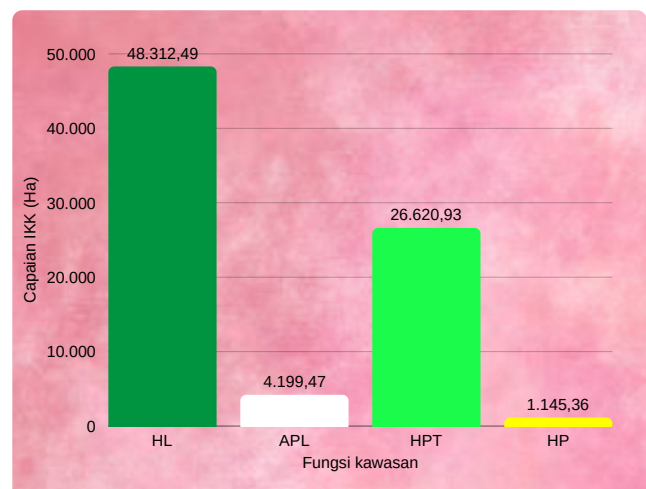
C. REGION SULAWESI



Gambar 23. Peta sebaran capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Sulawesi

Region Sulawesi merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling unik di Indonesia, bahkan dunia. Terletak tepat di jantung Wallacea sebuah zona transisi biogeografis yang memisahkan fauna tipe Asia dan Australia yang memiliki tingkat endemisitas yang sangat tinggi. Kekayaan hayati tersebut tersebar luas di seluruh penjuru Sulawesi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

Hasil Potensi Areal Preservasi di Region Sulawesi Tahun 2025, seluas 80.278,26 hektar berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Fungsi kawasan terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 48.312,49 hektar, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 4.199,47 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26.620,93 hektar dan Hutan Produksi (HP) seluas 1.145,36 hektar. Rincian luasan Potensi Areal Preservasi per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 24. Grafik capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Sulawesi berdasarkan fungsi kawasan

Tabel 8. Potensi Areal Preservasi Region Sulawesi

No	Provinsi	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan	Nilai Penting
1	Sulawesi Selatan	1	69.593,24	HL : 45.936,78 Ha HPT : 23.656,47 Ha	Habitat Anoa dataran tinggi, julang sulawesi, kera hitam, rusa timor, kuskus Sulawesi
2	Sulawesi Tengah	3	261,95	HPT : 201,59 Ha APL : 60,36 Ha	Habitat Maleo dan Penyu, Anoa dataran rendah, babirusa, Dao, kantong semar
3	Sulawesi Utara	3	9.144,20	APL: 4.100,10 Ha HL : 1.135,87 Ha HP : 1.145,36 Ha HPT : 2.762,87 Ha	Ekosistem Mangrove, Habitat Anoa dataran rendah, monyet sulawesi, Maleo, babirusa
Total		7	80.278,26		

Sulawesi Selatan menjadi lokasi dengan luasan potensi areal preservasi paling besar dengan luasan 69.593,24 yang berada di Kabupaten Pinrang dengan fungsi kawasan didominasi oleh Hutan Lindung (45.936,78 hektar) dan Hutan Produksi Terbatas (23.656,47 hektar). Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas potensi 261,95 hektar tersebar dalam tiga unit, dimana dua unitnya berada di APL seluas 60,36 hektar, sedangkan satu unit lainnya berada di areal perusahaan seluas 201,59 hektar. Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki potensi areal preservasi yang tersebar di tiga unit dengan total luas 9.144,20 hektar, dua unitnya merupakan koridor satwa Tanjung Binerean. Satu unit lainnya adalah Mangrove Torosiaje, yang juga merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang telah ditetapkan sejak tahun 2017.



Gambar 25. Perjumpaan dengan monyet hitam tonkean (*Macaca Tonkeana*) - (Dok BBKSDA Sulsel)

Potensi Areal Preservasi di Region Sulawesi memiliki nilai penting terhadap perlindungan keanekaragaman hayati terutama dalam menjaga keberlangsungan satwa endemik Sulawesi, seperti anoa dataran tinggi (*Bubalus quarlesi*), anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), babirusa (*Babyrousa babyrussa*), maleo (*Macrocephalon maleo*), tarsius (*Tarsius spectrumgurskyae*), monyet Sulawesi (*Macaca nigra*), monyet hitam tonkean (*Macaca Tonkeana*), musang sulawesi (*Macrogalidia muschenbroekii*), julang sulawesi (*Rhyticeros cassidix*).

Satwa-satwa endemik tersebut tersebar di seluruh daratan Sulawesi. Mengingat satwa seperti anoa dan babirusa memerlukan daya jelajah yang luas, keberadaan koridor penghubung antarhabitat menjadi sangat krusial. Dalam konteks ini, potensi Areal Preservasi di Sulawesi tidak hanya berfungsi sebagai habitat utama, tetapi juga sebagai koridor migrasi bagi fauna tersebut. Sementara itu, kekayaan flora di wilayah ini mencakup jenis seperti dao (*Dracontomelon dao*), anggrek bulan sulawesi (*Phalaenopsis celebensis*) dan kantong semar (*Nepenthes adriani*) serta berbagai jenis mangrove seperti *Rhizophora mucronata*, *Ceriops Tagal sp.*, *Sonneratia sp.*, *Avicennia sp.* dan *Bruguiera sp.*

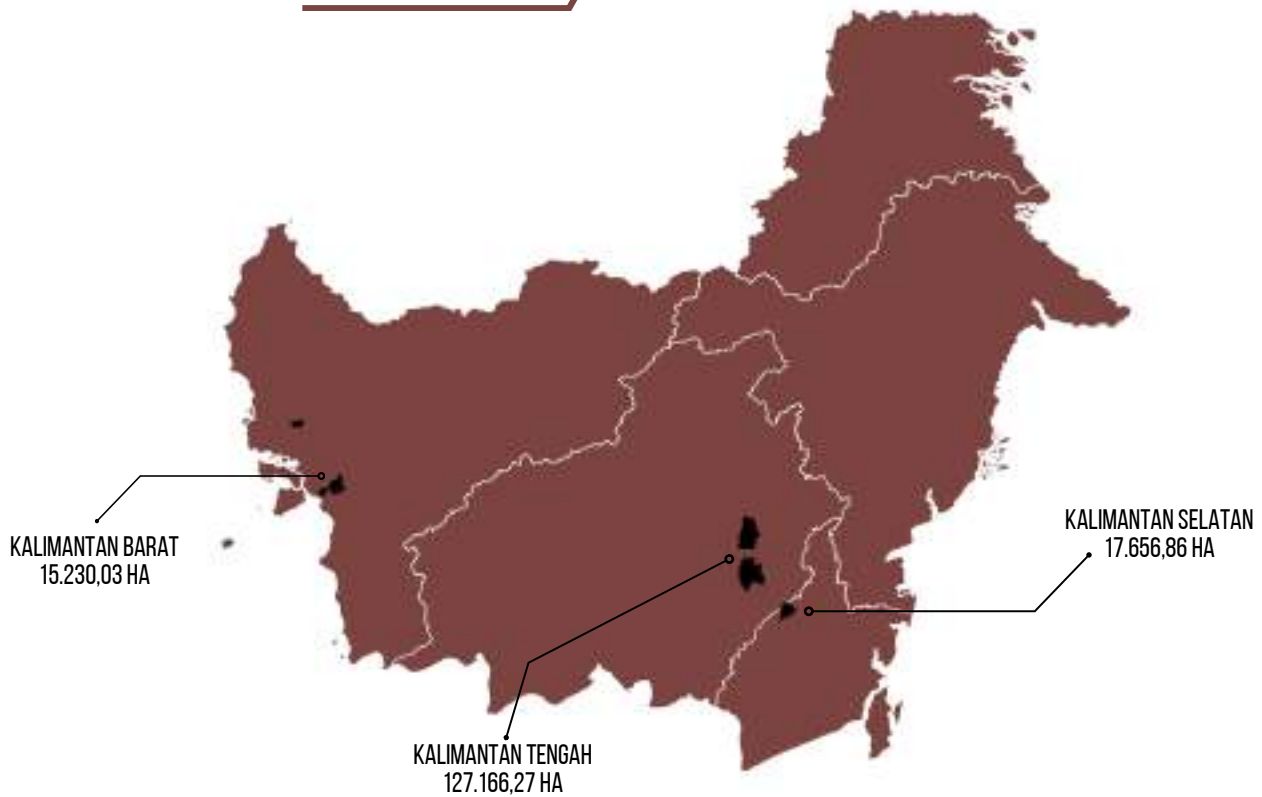
Tutupan lahan didominasi oleh hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur dan semak belukar. Variasi tutupan ini menegaskan peran strategis Areal Preservasi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi satwa endemik, serta memperkuat fungsi perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Secara biogeografis, wilayah ini mencakup zona transisi Wallacea yang unik, di mana karakter bentang alamnya terbagi ke dalam beberapa unit ekoregion utama.

Unit-unit potensi areal preservasi tersebut, meliputi Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu – Bogani Nani Wartabone yang menjadi tulang punggung konservasi dataran tinggi, Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Polewali – Palopo yang subur, serta Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Wera-Tavaili. Integrasi antara keragaman tutupan lahan dan kompleksitas ekoregion ini menjadikan Region Sulawesi sebagai prioritas dalam upaya preservasi guna mitigasi degradasi habitat dan mempertahankan konektivitas ekologis di masa depan.



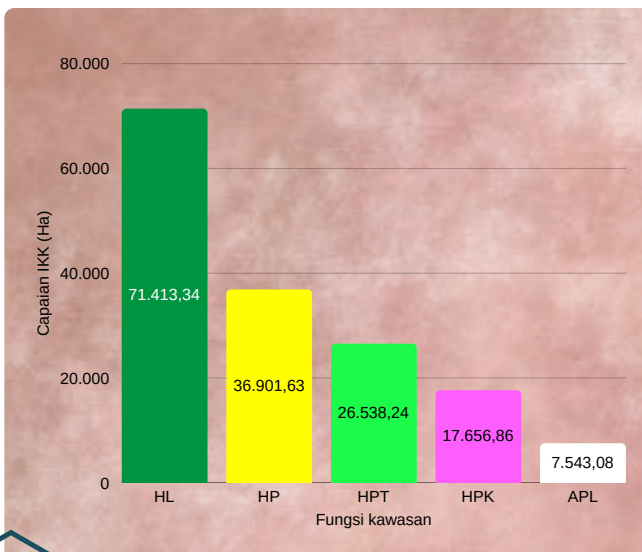
Gambar 26. Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapang bidang Areal Preservasi yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai KSDA pada region Sulawesi

D. REGION KALIMANTAN



Gambar 27. Peta sebaran capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Kalimantan

Pulau Kalimantan merupakan salah satu bentang alam tropis terpenting di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat keanekaragaman hayati Borneo. Berdasarkan hasil Potensi Areal Preservasi di Region Kalimantan Tahun 2025, seluas 160.053,16 hektar berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. hasil pada tiap provinsi disajikan dalam grafik berikut :



Gambar 28. Grafik capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Kalimantan berdasarkan fungsi kawasan

Fungsi kawasan terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 71.413,34 hektar, Hutan Produksi (HP) seluas 36.901,63 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26.538,24 hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 17.656,86 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 7.543,08 hektar. Capaian tersebut merupakan hasil kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh UPT KSDAE Balai Besar/Balai KSDA lingkup Region Kalimantan. Rincian luasan Potensi Areal Preservasi per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Potensi Areal Preservasi Region Kalimantan

No	Provinsi	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan	Nilai Penting
1	Kalimantan Barat	2	15.230,03	HL : 5.051,73 Ha HP : 2.708,79 Ha APL : 7.469,51 Ha	Rawa Gambut, Habitat Orangutan Kalimantan
2	Kalimantan Tengah	1	127.166,27	HL : 66.361,61 Ha HP : 34.192,84 Ha HPT : 26.538,24 Ha APL : 73,57 Ha	Habitat Satwa Endemik dan Dilindungi, diantaranya Bekantan, Orangutan Kalimantan, dan Rangkong Badak
3	Kalimantan Selatan	1	17.656,86	HPK : 17.656,86 Ha	Habitat Orangutan Kalimantan
	Total	4	160.053,16		

Unit Areal Preservasi di Region Kalimantan menggambarkan sebaran wilayah potensial yang secara spasial terkonsentrasi pada ekosistem penting dengan total 4 unit dan luas mencapai 160.053,16 hektar. Meskipun secara kuantitas jumlah unit terbanyak berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan 2 unit, namun secara kualitas luasan, Kalimantan Tengah mendominasi luasan dengan cakupan area mencapai 127.166,27 hektar. Distribusi potensi Areal Preservasi di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan bahwa populasi orangutan memanfaatkan lanskap multi-fungsi, termasuk kawasan di luar hutan negara. Hal ini menegaskan bahwa keberlangsungan spesies kunci di wilayah tersebut sangat bergantung pada pengelolaan area di luar kawasan konservasi formal.

Sementara itu, Kalimantan Tengah menjadi episentrum Areal Preservasi dengan distribusi yang lebih kompleks. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar habitat spesies kunci berada dalam mosaik lanskap hutan lindung dan hutan produksi yang saling terhubung secara ekologis. Kondisi tersebut menuntut adanya integrasi kebijakan yang mampu menjamin konektivitas antar-fungsi kawasan guna mencegah fragmentasi habitat lebih lanjut. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan karakteristik berbeda dan unik, dimana seluruh Areal Preservasi berada dalam fungsi HPK. Kondisi ini memberikan sinyal kuat adanya nilai konservasi tinggi pada kawasan yang secara tata ruang sebenarnya diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi. Fenomena ini menegaskan urgensi penguatan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan dan perlunya diskresi konservasi dalam ruang produksi, agar fungsi ekologis tetap terjaga tanpa menegasikan potensi pemanfaatan wilayah secara bertanggung jawab.



Gambar 29. Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapang bidang Areal Preservasi yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai KSDA pada region Kalimantan

Lanskap Kalimantan didominasi oleh habitat penting bagi spesies kunci seperti orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), bekantan (*Nasalis larvatus*), owa Kalimantan (*Hylobates albibarbis*), serta macan dahan (*Neofelis diardi*). Keempat spesies ini berperan sebagai indikator kesehatan ekosistem hutan hujan dataran rendah hingga kawasan riparian dan rawa gambut. Habitat satwa lain yang dijumpai, diantaranya lutung (*Trachypithecus cristatus*), enggang klihingan (*Anorrhinus galeritus*), dan rangkong badak (*Buceros rhinoceros*).

Secara biofisik, karakteristik lanskap di seluruh unit preservasi ini didominasi oleh tipologi ekosistem lahan basah dan transisi yang khas. Tutupan lahan secara dominan terdiri atas hutan rawa sekunder, semak belukar rawa dan rawa, yang mengindikasikan adanya dinamika suksesi alami di kawasan tersebut. Kehadiran bentang rawa yang luas serta petak-petak hutan lahan kering sekunder memberikan variasi stratifikasi tajuk yang krusial bagi keberlangsungan habitat satwa arboreal dan terestrial. Kombinasi tutupan ini mencerminkan sebuah ekosistem yang meskipun telah mengalami intervensi di masa lalu, namun tetap memiliki nilai konservasi tinggi sebagai penyangga hidrologis dan koridor kehidupan bagi spesies endemik di sekitarnya.

Secara ekologis, unit-unit preservasi ini berada pada bentang alam yang sangat strategis, yakni melintasi tiga wilayah ekoregion gambut utama di Kalimantan. Kawasan tersebut mencakup Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Kahayan – Kapuas – Mahakam, Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Katingan – S. Sebangau, serta Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Terentang – S. Kapuas. Keberadaan potensi Areal Preservasi di dalam kompleks ekoregion ini menegaskan perannya sebagai penyangga hidrologis gambut yang saling terkoneksi. Penempatan unit-unit ini pada sistem aliran sungai-sungai besar tersebut menunjukkan bahwa upaya konservasi di wilayah ini tidak hanya bertujuan untuk perlindungan biodiversitas darat, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem perairan dan cadangan karbon raksasa yang tersimpan dalam formasi gambut dalam.



Gambar 30. Pengamatan dan inventarisasi orangutan kalimantan - (Dok BKSDA Kalimantan Selatan)

E. REGION MALUKU PAPUA

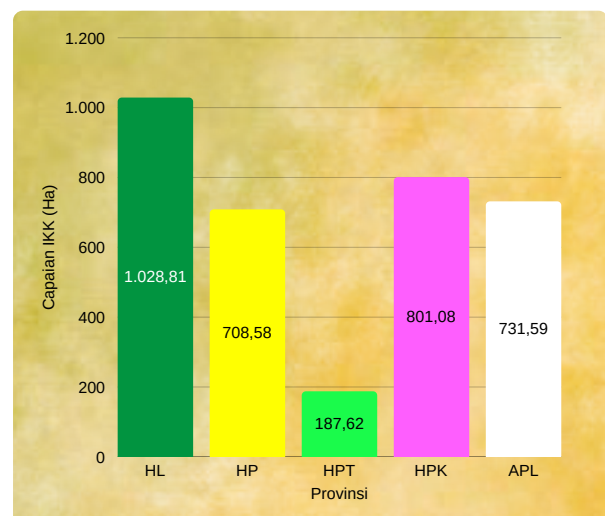


Gambar 31. Peta sebaran capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Maluku Papua

Keanekaragaman hayati di wilayah timur Indonesia, khususnya Region Papua dan Maluku, merepresentasikan unit biogeografi yang memiliki kekhasan tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan hasil interaksi antara dinamika tektonik, sejarah geologi, isolasi geografis, serta proses evolusi yang berlangsung dalam rentang waktu geologis yang panjang. Kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk komposisi spesies dengan tingkat endemisitas tinggi serta variasi ekosistem yang kompleks. Guna memastikan perlindungan ekosistem tersebut, kegiatan identifikasi dan kunjungan lapangan di Region Maluku dan Papua dilakukan oleh Balai Besar/Balai KSDA sebagai langkah verifikasi data potensi Areal Preservasi

Hasil Potensi Areal Preservasi di Region Maluku dan Papua Tahun 2025, seluas 3.457,68 hektar berada di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat Daya. Fungsi kawasan terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 1.028,81 hektar, Hutan Produksi (HP) seluas 708,58 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 187,62 hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 801,08 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 731,59 hektar .

Rincian luasan Potensi Areal Preservasi per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 32. Grafik capaian IKK Luas Areal Preservasi yang dikembangkan di region Maluku Papua berdasarkan fungsi kawasan

Tabel 9. Potensi Areal Preservasi Region Kalimantan

No	Provinsi	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan	Nilai Penting
1	Maluku	3	1.086,48	HL : 35,19 Ha HP : 708,58 Ha HPT : 187,62 Ha APL: 155,08 Ha	Habitat Cendrawasih
2	Maluku Utara	1	380,30	APL : 380,30 Ha	Habitat Cendrawasih Merah
3	Papua	1	1.518,39	HL : 993,62 Ha HPK : 328,56 Ha APL: 196,21 Ha	Habitat Nuri Arudan Cendrawasih
4	Papua Barat Daya	1	472,52	HPK : 472,52 Ha	Habitat Gosong Maluku dan Kakatua Putih
	Total	6	3.457,68		

Unit Potensi Areal Preservasi di Region Maluku dan Papua mencakup 6 unit dengan total luas 3.457,68 hektar, yang secara spasial terkonsentrasi pada habitat burung endemik. Secara kuantitas, Provinsi Maluku memiliki jumlah unit terbanyak yaitu 3 unit (Karst Sapalewa Taniwel, Lorang dan Wakua) dengan dominasi fungsi hutan produksi, sementara secara kualitas luasan, Provinsi Papua mendominasi dengan 1 unit potensi (ABKT/AKKM Kampung Tablasupa) seluas 1.518,39 hektar yang mayoritas berada di hutan lindung. Distribusi ini menunjukkan bahwa meskipun Papua memiliki perlindungan status kawasan yang lebih kuat, wilayah Maluku dan Maluku Utara menghadapi tantangan konservasi yang lebih besar karena habitat satwa kuncinya berada di luar kawasan lindung, seperti APL dan hutan produksi. Karakteristik unit di Maluku Utara sebanyak 1 unit (Mangrove Kao) dan Papua Barat Daya sebanyak 1 unit (LPHP Saporkren) mempertegas urgensi perlindungan habitat dalam ruang di luar kawasan konservasi, di mana seluruh areanya masing-masing berada pada fungsi APL dan HPK. Ekosistem yang berkembang merupakan lanskap karst dengan tutupan hutan lahan kering sekunder.



Gambar 33. Kegiatan sosialisasi dan kunjungan lapang bidang Areal Preservasi yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai KSDA pada region Maluku Papua

Nilai penting kawasan ini terletak pada perannya sebagai benteng keanekaragaman hayati bagi spesies ikonik seperti cenderawasih belah rotan (*Cicinnurus magnificus*), cenderawasih kuning kecil (*Paradisaea minor*), cenderawasih merah (*Paradisaea rubra*), dan cenderawasih (*Paradisaea apoda*). Ekosistem ini juga menjadi habitat vital bagi berbagai jenis burung paruh bengkok dan kakatua, mulai dari kakatua raja (*Probosciger aterrimus*), kakatua koki (*Cacatua galerita*), kakatua maluku (*Cacatua moluccensis*), hingga nuri bayan papua (*Eclectus roratus*), nuri aru (*Chalcopsitta sintillata*), dan nuri pipi merah (*Geoffroyus geoffroyi*). Keberlangsungan spesies lain seperti mambruk ubiaat (*Goura cristata*), kasturi kepala hitam (*Lorius lory*), perkici pelangi (*Trichoglossus haematodus*), pergam Zoe (*Psittaculirostris desmarestii*), serta vegetasi bakau hitam (*Rhizophora mucronata*) dan api-api putih (*Avicennia marina*) sangat bergantung pada integrasi pengelolaan di seluruh unit preservasi tersebut agar fungsi ekologisnya tetap terjaga.



Gambar 34. Perjumpaan dengan cendrawasih merah (*Paradisaea rubra*) dan kakatua raja (*Probosciger aterrimus*)
- (Dok BBKSDA Papua Barat Daya)

Kondisi fisik di lapangan menunjukkan variasi tutupan lahan yang mencerminkan karakteristik ekosistem daratan dan pesisir di wilayah timur Indonesia. Lanskap potensi Areal Preservasi Maluku dan Papua didominasi oleh Hutan lahan kering primer yang menjadi inti habitat asli, namun juga bersinggungan dengan area Pertanian lahan kering, Pertanian lahan kering campur, serta Semak belukar. Selain itu, terdapat zona transisi berupa Hutan mangrove sekunder dan Tubuh air yang mendukung kehidupan satwa air, hingga area Lahan terbuka yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pemulihan ekosistem. Mosaik tutupan lahan ini menegaskan pentingnya perlindungan areal preservasi agar area hutan primer tidak terfragmentasi oleh perluasan lahan pertanian maupun pembukaan lahan baru.

Berdasarkan data ekoregion pada potensi Areal Preservasi, wilayah Papua dicirikan oleh karakteristik bentang alam yang unik, yakni Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Sungai Wakamba - Sungai Warembori dan Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural P. Waigeo.

Sementara itu, wilayah Maluku memiliki keragaman geofisik yang terdiri dari Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural P. Seram, Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Kep. Aru, serta Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Maluku Utara. Perbedaan karakteristik ekoregion ini mempertegas bahwa strategi pelestarian satwa endemik di masing-masing unit harus disesuaikan dengan kondisi biofisik wilayahnya, mulai dari ekosistem pegunungan hingga dataran fluvial yang spesifik.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian signifikan habitat spesies kunci berada di luar kawasan konservasi maupun di luar kawasan hutan negara. Kondisi tersebut meningkatkan tingkat kerentanan terhadap tekanan gangguan aktivitas manusia, seperti konversi lahan, ekspansi infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan berbasis lanskap (landscape-based management), penguatan skema perlindungan habitat di luar kawasan konservasi, serta integrasi kebijakan tata ruang guna menjamin keberlanjutan ekologis dan kelestarian populasi spesies kunci di wilayah timur Indonesia.



DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Penyusunan NSPK

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) luas areal preservasi yang dikembangkan dan telah tervalidasi Tahun 2025 seluas **434.421,34 hektar** atau **141,06%** dari total luas target. Hasil ini diperoleh dari 22 Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional yang telah menyampaikan laporan capaian dan divalidasi secara nasional.

Pada bulan Maret 2025 dilakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian target kinerja menjadi 301.304,70 hektar pada 20 UPT Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kinerja ini diperkuat oleh peran Direktorat Jenderal KSDAE menjadi salah satu Implementing Partner Proyek RBC FOLU Norway Contribution 2&3 untuk periode pelaksanaan Tahun 2025-2027. Melalui proyek ini, Direktorat PEBAP menargetkan identifikasi potensi daerah penyangga dan ABKT seluas 510.386,13 Ha di 21 UPT Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional, yang secara strategis mendukung keberlanjutan pengembangan areal preservasi nasional.

Hasil capaian Tahun 2025 telah melebihi target yang telah disesuaikan dampak efisiensi tersebut. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya pengurangan pagu anggaran inventarisasi dan verifikasi kehati. Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi dengan para pihak sudah mulai terbangun dengan baik, seperti dengan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat maupun dunia usaha.

B. Rekomendasi

Kegiatan luas areal preservasi yang dikembangkan merupakan penting dalam upaya memetakan area-area yang memiliki potensi tinggi untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Ke depan, area-area tersebut diharapkan dapat tergambarkan dalam skala lanskap yang lebih luas, sehingga analisis mengenai keterwakilan tipe ekosistem, konektivitas, serta pola penggunaan kawasan dalam tata ruang perlu segera dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting sekaligus menyusun berbagai skenario dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kelestarian area-area yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, hasil-hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut perlu dikomunikasikan secara intensif kepada para pihak agar dapat menjadi bagian dari upaya pengarusutamaan keanekaragaman hayati.